

## **SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW: FRAUD PREVENTION IN GOVERNMENT**

**Zulkarnain<sup>(1)</sup>, Fefti Yulian Mela<sup>(2)</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Pasir Pengaraian, Riau, Indonesia

---

### **Abstract**

Penelitian ini bertujuan mensintesis temuan empiris mengenai strategi pencegahan fraud pada sektor pemerintah melalui pendekatan systematic literature review (SLR). Kajian dilaksanakan terkait berbagai artikel ilmiah yang meneliti praktik pencegahan kecurangan pada organisasi publik di berbagai konteks pemerintahan, termasuk di Malaysia, Indonesia, Pakistan, Nigeria, dan Kenya. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pencegahan fraud bersifat multidimensional dan dipengaruhi oleh integrasi mekanisme pengendalian internal, sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system), audit dan akuntansi forensik, pemanfaatan teknologi deteksi fraud, serta penguatan budaya organisasi dan manajemen sumber daya manusia. Pengendalian internal yang kuat terbukti menjadi pilar utama dalam membatasi peluang terjadinya kecurangan, sementara teknologi berbasis analitik memungkinkan deteksi anomali secara proaktif. Selain itu, pembangunan budaya integritas dan peningkatan kompetensi pegawai memperkuat efektivitas sistem pengendalian formal. Temuan penelitian menegaskan bahwa strategi pencegahan fraud yang efektif dalam sektor pemerintah memerlukan pendekatan tata kelola yang komprehensif, sistematis, dan berkelanjutan. Hasil kajian ini memberikan implikasi teoritis bagi pengembangan model pencegahan fraud sektor publik serta implikasi praktis bagi perumusan kebijakan pengawasan pemerintahan.

**Keywords:** pencegahan fraud, sektor pemerintah, pengendalian internal, whistleblowing system, systematic literature review.

(\*) Corresponding Author: [Zulkarnain@upp.ac.id](mailto:Zulkarnain@upp.ac.id)

---

### **INTRODUCTION**

Pemerintah merupakan sebuah Lembaga yang menjalankan wewenang dan kekuasaan dalam kehidupan sosial, ekonomi dan politik. Pemerintah yang baik tentu didukung dengan berbagai aspek, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efisiensi, dan inovasi, serta kepemimpinan dan integritas. Hal ini juga meliputi penegakan hukum, pemberantasan korupsi, evaluasi, dan pembelajaran, serta pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien.

Maraknya Tingkat kasus korupsi di seluruh dunia menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara, meningkatkan ketimpangan pendapatan, dan menghambat Pembangunan (Wolfe dan Hermanson, 2004). Korupsi juga menciptakan citra negatif pada pemerintah dan lembaga publik, serta dapat memperparah kemiskinan dan ketidaksetaraan. Tindakan kecurangan kini dipandang sebagai problem dunia, lantaran sudah menjangar luas secara menyeluruh baik dalam ranah bisnis maupun pemerintahan, mengakibatkan tiada satupun bangsa yang imun dari dampaknya, walau negara-negara yang tengah berkembang merupakan pihak yang menanggung dampak terbesar (Okoye dan Gbegi, 2013). Diskusi mengenai *fraud* senantiasa menyita atensi khalayak umum. *Fraud* mampu diterangkan sebagai implementasi akal bulus atau perbuatan licik yang diniatkan untuk merampas kepemilikan sah pihak lain, aset, atau properti (Ernst dan Young, 2005). Akan tetapi, Albrecht, (2004); Hopwood, (2008); Rezaee, (2010); Kranacha (2011) serta KPMG (2011) mengemukakan bahwa *fraud*

mencakup penggunaan kebohongan yang terencana serta aksi masuk akal lainnya demi meraih profit tak sah atas suatu organisasi meski berisiko memicu kerugian. Di sisi lain, *The Institute of Internal Auditors* (IIA) menjabarkan kecurangan untuk rangkaian ketidakpatuhan dan tindakan melanggar hukum yang dicirikan oleh manipulasi terencana yang dieksekusi demi keuntungan atau kerugian korporasi serta individu-individu eksternal dan internalnya (Gunadi, 2001).

Fraud atau kecurangan dalam sektor pemerintahan merupakan isu yang terus menjadi sorotan baik di tingkat nasional ataupun internasional. Praktik fraud dalam pemerintahan dapat mencakup korupsi, penyalahgunaan anggaran, penggelapan dana, manipulasi laporan keuangan, hingga penyalahgunaan kewenangan. Kecurangan tersebut tidak hanya memunculkan kerugian finansial yang signifikan, melainkan juga mengikis kepercayaan publik terhadap institusi negara dan menghambat pembangunan (Transparency International, 2022). Para peneliti telah menunjukkan bahwa organisasi biasanya menghabiskan banyak upaya dalam mendeteksi penipuan daripada mencegahnya (Omar & Bakar, 2012).

Berdasarkan *Occupational Fraud 2024: A Report to the Nations* yang diterbitkan oleh *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE), terdapat 1.921 kasus korupsi diseluruh dunia. Dari 1.921 kasus penipuan yang dianalisis di 138 negara, sektor pemerintahan dan administrasi publik menyumbang 171 kasus (9% dari total), dengan kerugian median sebesar US\$150.000 per kasus. Dimana Jenis penipuan yang paling umum adalah penyalahgunaan aset (89% kasus), diikuti oleh korupsi (48%) dan penipuan laporan keuangan (5%). Korupsi di sektor pemerintahan ini disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya Lebih dari setengah kasus terjadi karena kurangnya kontrol internal atau pengabaian terhadap kontrol yang ada. Temuan ini menyoroti pentingnya penerapan kontrol internal yang kuat, pelatihan anti-penipuan, dan saluran pelaporan yang efektif di sektor pemerintahan untuk mencegah dan mendeteksi korupsi. Pengawasan yang ketat dan budaya integritas yang kuat sangat diperlukan untuk mengurangi risiko penipuan dan korupsi di sektor publik.

Indonesia termasuk dalam kategori bangsa dengan angka rasuah yang cukup besar. Berdasarkan catatan yang dikompilasi oleh *Indonesian Corruption Watch*, terungkap bahwasanya sepanjang periode 2023, ICW mendeteksi adanya lonjakan yang amat drastis dibandingkan kurun waktu lampau, yakni tercatat 791 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.695 individu dinyatakan sebagai tersangka pada aparat hukum. Dari keseluruhan perkara yang berhasil dipantau, estimasi kerugian keuangan negara menyentuh angka Rp 28.412.786.978.089 (Rp28,4 triliun), proyeksi nilai suap serta gratifikasi berjumlah Rp 422.276.648.294 (Rp422 miliar), perkiraan pungli maupun pemerasan senilai Rp 10.156.703.000 (Rp 10 miliar), dan proyeksi aset yang disembunyikan melalui tindak pencucian uang mencapai Rp 256.761.818.137 (Rp256 miliar).

*Transparency International* dalam jajak pendapatnya tahun 2023 juga mengindikasikan bahwa posisi Indonesia berada di urutan 90 dari 176 negara yang diteliti tingkat korupsinya dengan poin 37 (Transparency International 2023).

Berdasarkan data statistic tindak pidana korupsi berdasarkan instansinya bahwa di Indonesia tahun 2024 terdapat 1.654 kasus korupsi yang tersebar di berbagai instansi pemerintah Di Indonesia, yang akan terpaparkan pada table 1.1 :

Tabel 1.1. Tindakan Pidana Korupsi Berdasarkan Instansi  
Tahun 2004 s.d 2025

NO	Istanasi	Jumlah Kasus
1	DPR RI	86
2	Kementerian/Lembaga	515
3	BUMN/BUMD	192
4	Komisi	31

5	Pemerintah Provinsi	224
6	Pemkab/Pemkot	646
<b>Jumlah</b>		1694

Sumber: KPK.go.id, 2025

Berdasarkan data tersebut menggambarkan bahwa Tingkat kasus korupsi di Indonesia memiliki keragaman Tindakan pidana korupsi yang dilihat dari jumlah tindakannya, Dimana Tindakan pidana kasus korupsi terbesar berada pada instansi pemerintah kabupaten dan Kota yang memiliki jumlah kasus sebesar 646 dan instansi yang memiliki kasus terendah adalah di Istansi Komisi yaitu sebanyak 31 kasus dari total kasus sebesar 1.694.

Pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam setiap proses tata kelola. Oleh karena itu, upaya pencegahan fraud harus dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan. Pencegahan dapat dilakukan melalui penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan kualitas audit, penerapan teknologi informasi, serta pengembangan budaya organisasi yang berintegritas (Arifin & Utami, 2020).

Meskipun berbagai studi telah membahas strategi dan pendekatan dalam mencegah fraud di sektor publik, hasil-hasil tersebut masih bersifat tersebar dan belum terintegrasi secara komprehensif. Oleh karena itu, pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR) jadi metode yang selaras guna menghimpun, menilai, dan mensintesis hasil-hasil dari berbagai literatur ilmiah terkait pencegahan fraud pada pemerintahan. Metode SLR memfasilitasi investigator guna memetakan tren mendasar, tata cara unggulan, serta kekosongan studi yang wajib segera diatasi (Kitchenham, 2004).

Dengan melakukan kajian literatur secara sistematis, studi ini diharapkan dapat memuat kontribusi dalam merumuskan kerangka konseptual serta rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk memperkuat sistem pencegahan fraud di sektor pemerintahan Indonesia dan konteks internasional yang relevan.

## METHODS

Dalam studi ini, peneliti menerapkan kajian literatur memakai pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR). Teknik SLR difungsikan guna membantu menyusun pola pikir kritis serta agenda riset masa depan pada perspektif bidang studi baru. Metode SLR ini berlandaskan pada struktur logis dengan merumuskan ketentuan analisis data dan interpretasi.

Prosedur dalam menjalankan SLR ini, secara garis besar terbagi atas 3 komponen utama, yakni *Planning*, *Conducting* dan *Reporting*. *Planning* yang dibagi lagi menjadi 2 tahap lagi yaitu *Formulate the Review's Research Question* dan *Develop the Review's Protocol*. Langkah awal sekaligus fondasi berjalannya SLR ialah *Research Question* (RQ). *Research Question* ini dipakai untuk memandu mekanisme pencarian serta ekstraksi referensi. Penyusunan RQ bertumpu pada lima elemen yang populer dengan sebutan PICOC.

1. *Population* (P): Kelompok sasaran studi yakni berupa entitas-entitas yang tercatat di BEI.
2. *Intervention* (I): Rincian aspek investigasi, atau topik yang diminati peneliti yaitu berupa kecurangan laporan keuangan.
3. *Comparison* (C): Segi dari studi dimana Intervensi (I) akan disandingkan.
4. *Outcomes* (O): Dampak dan keluaran dari Intervensi (I) salah satunya faktor yang memengaruhi kecurangan laporan keuangan.
5. *Context* (C): Pengaturan dan situasi dari

Sesudah *Research Question* (RQ), tahapan selanjutnya ialah merancang protokol SLR, yakni menyusun perencanaan yang memuat prosedur serta metode yang akan diterapkan dalam melaksanakan SLR. Fase kedua yakni tahap *Conducting* yang ialah serangkaian aktivitas yang berisi realisasi dari SLR. Tahap *Conducting* ini dipecah ke dalam 5 sub-tahap, di antaranya *Identify the Relevant Literature*, *Perform Selection of Primary Studies*, *Perform Data Extraction*, *Assess Studies' Quality*, dan *Conduct Synthesis of Evidence*.

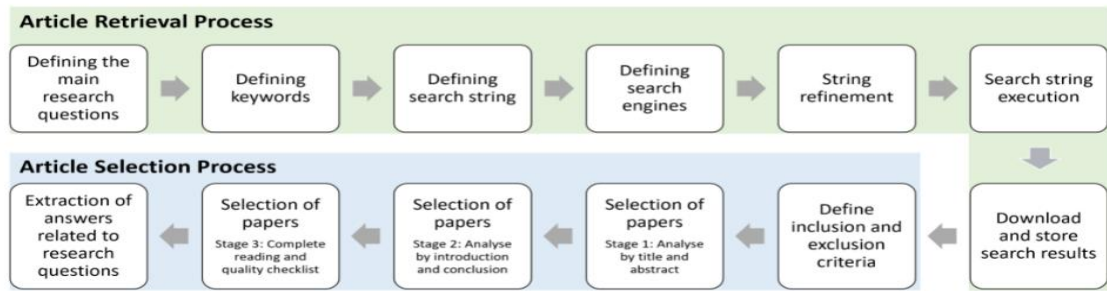
Prosedur ini diawali dengan menetapkan *keyword* pencarian pustaka. Pada penelitian ini, referensi yang ditargetkan ialah perihal deteksi *fraud* dan Indikator – Indikator pengukuran deteksi *Fraud*. Selanjutnya, prosedur berikutnya ialah pemetaan basis data sumber pencarian pustaka. Literatur terkait *keyword* pada riset ini amatlah banyak, maka demi mempermudah dalam pengorganisasian pustaka dianjurkan untuk memakai *tool software* yakni Mendeley.

Tahap berikutnya yang perlu dijalankan bila seluruh referensi telah tersedia ialah menyeleksi literatur yang relevan. Untuk mekanisme ini, dianjurkan untuk menetapkan kriteria yakni kriteria inklusi dan kriteria eksklusi yang difungsikan sebagai penyaring guna memilah yang relevan dan tidak relevan. Dalam kajian ini ditemukan 48 makalah terkait topik riset lewat basis data Google Scholar dari tahun 2022 sampai 2025.

Prosedur akhir pada proses *conducting* ialah melakukan ekstraksi data dan menyintesis hasil temuan pada artikel jurnal yang diseleksi. Langkah ini dikerjakan usai memperoleh makalah jurnal yang dibutuhkan. Peneliti menyusun ikhtisar untuk artikel jurnal yang telah dipilah. Ringkasan tersebut mencakup perihal perspektif umum dari seluruh artikel jurnal pilihan. Upaya tersebut dimaksudkan untuk meringankan peneliti dalam merampungkan tulisan akademis ini tanpa wajib membuka dan menelaah kembali tiap berkas jurnal itu. Merujuk pada (Wahono, 2016) sasaran dari pengumpulan informasi ini ialah untuk menelaah dan menimbang temuan studi yang beragam dari referensi berbeda dan digunakan untuk menetapkan teknik yang sesuai guna menguraikan penjelasan serta tafsiran hasil..

Prosedur terakhir untuk menjalankan SLR ialah fase *Reporting*, yakni tahapan penyusunan hasil SLR dalam format karya, baik karya untuk diterbitkan dalam bentuk *paper* ke jurnal ilmiah atau untuk merancang tinjauan literatur pada Bab 2 dari skripsi/tesis/disertasi (Wahono, 2013). Prosedur *Reporting* ini dipecah ke dalam 3 sub-tahapan, di antaranya *Write up the SLR Paper* dan *Choose the Right Journal*. Struktur penulisan SLR ini umumnya termuat atas 3 komponen, yakni bagian pendahuluan yang memuat latar belakang serta dasar mengenai urgensi SLR dalam suatu topik. Pada bagian inti memuat protokol SLR, temuan analisis dan sintesis hasil serta implikasi pada temuan SLR. Sementara pada bagian kesimpulan memuat ringkasan pada temuan yang diperoleh selaras pada RQ yang telah dipilih. Untuk tahapan inilah SLR difungsikan guna menulis artikel “Pendeteksi Fraud”.

Sesuai dengan metodologi yang diuraikan oleh (Al-Sabaeei et al., 2023), penelitian ini mengadopsi langkah-langkah SLR dalam (Thilakarathne et al., 2019) Untuk melakukan tinjauan pustaka sistematis (SLR), seseorang harus mematuhi langkah-langkah utama yang diuraikan dalam Gambar 1.



Sumber: Thilakarathne dkk., 2019

Gambar 1 -Proses tinjauan pustaka sistematis

1. Menentukan konsep dan kata kunci yang relevan

Pada tahap ini, mengidentifikasi tiga konsep kunci yang penting bagi topik dan pertanyaan penelitian:

Kata kunci 1: “pencegahan fraud”

Kata kunci 2: “Penipuan di sektor pemerintahan”

Kata Kunci 3: “Deteksi Penipuan di Sektor Pemerintahan”

Dengan merenungkan sinonim, varian ortografi, dan singkatan, kami mengekstrapolasi leksikon yang dihasilkan: "Pencegahan fraud," "Penipuan di sektor pemerintahan," "Deteksi Penipuan,".

2. Membangun kueri pencarian

Kata kunci yang ditemukan kemudian digabungkan melalui penggunaan operator Boolean. Dengan menggunakan kerangka kerja PICO dan "Medical Subject Headings" (MESH), rangkaian pencarian yang dihasilkan adalah: "Pencegahan Fraud" ATAU "pencegaha penipuan" DAN "Deteksi Penipuan" ATAU "deteksi penipuan" DAN "Sektor Pemerintahan" ATAU "pemerintah."

3. Memilih mesin pencari yang sesuai

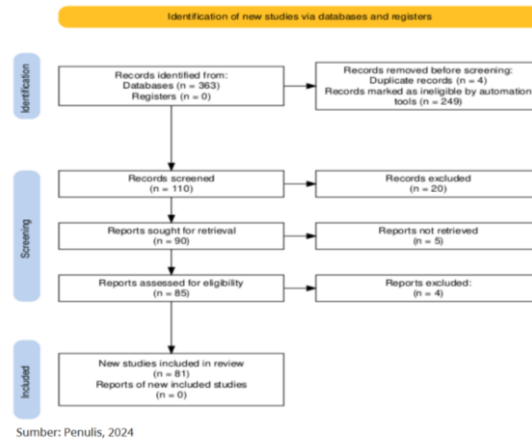
Pada fase ini, kami memilih mesin pencari yang relevan untuk memastikan cakupan yang komprehensif literatur, sehingga meningkatkan kemungkinan menemukan artikel yang sangat relevan. Untuk tinjauan ini, Dimensions.ai dipilih sebagai basis data utama.

4. Memperbaiki kueri

Rangkaian pencarian diujicobakan dalam database Dimensions.ai untuk mengevaluasi relevansi artikel yang dikembalikan. Makalah relevan yang telah diidentifikasi sebelumnya, yang dapat berfungsi sebagai studi primer yang potensial, telah ditemukan. Dalam kasus di mana tidak ada hasil yang relevan muncul, rangkaian pencarian dimodifikasi dan disempurnakan sesuai kebutuhan untuk meningkatkan efektivitasnya

5. Melakukan pencarian dan meninjau hasil pencarian

Setelah menyelesaikan rangkaian pencarian, pencarian tersebut dijalankan di basis data Dimensions.ai. Hasil dari proses pencarian tersebut direpresentasikan secara visual dalam diagram alir. PRISMA, yang diilustrasikan pada Gambar 2.



Gambar 2: Aliran diagram PRISMA

## 6. Menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi

Kami berfokus untuk memastikan pemilihan studi yang relevan dan berkualitas tinggi berdasarkan beberapa kriteria inklusi: tahun publikasi antara 2014 dan 2024, artikel bersifat akses terbuka (All OA), jenis publikasi berupa artikel, dan artikel ditulis dalam bahasa Inggris. Kriteria eksklusi adalah sebagai berikut: artikel yang tidak terkait dengan sektor perbankan, artikel yang tidak menggunakan pembelajaran mesin untuk deteksi penipuan, dan artikel non-riset, seperti tajuk rencana, opini, dan ulasan tanpa data empiris.

## 7. Memilih studi yang relevan

Pencarian awal menghasilkan 81 artikel, yang kemudian disaring berdasarkan relevansinya dengan meninjau judul, abstrak, dan kata kunci. Artikel yang tidak memenuhi kriteria inklusi dikecualikan. Artikel yang tersisa menjalani tinjauan teks lengkap terperinci untuk memastikan bahwa artikel tersebut memenuhi semua kriteria yang ditentukan. Proses penyaringan yang cermat ini akhirnya menghasilkan 81 artikel yang disertakan dalam analisis akhir

## 8. Mengekstraksi jawaban atas pertanyaan penelitian.

Pertanyaan penelitian dijawab melalui analisis sistematis dari makalah yang dipilih pada langkah sebelumnya. Lembar kerja digunakan untuk mendokumentasikan kemungkinan jawaban saat setiap makalah ditinjau. Ringkasan data yang dikumpulkan selama fase penyaringan akhir disajikan dalam Tabel 1, sementara temuan dan interpretasi terperinci dibahas dalam bagian Temuan dan Pembahasan berikutnya

## RESULTS & DISCUSSION

Merujuk pada temuan ekstraksi informasi melalui teknik SLR, strategi-strategi yang diterapkan dalam penanggulangan *fraud* mampu dijabarkan pada Tabel 2.

Tabel 2. Literature terkait Strategi Pencegahan Fraud

Penulis	Lokasi	Strategi Pencegahan Fraud
(Ghazali et al., 2014)	Pemerintahan Malaysia	Membentuk auditor internal - Menetapkan kanal telepon langsung ataupun nomor bebas biaya untuk mempermudah pelaporan

		<i>fraud</i> - Regulasi terkait keamanan komputer - Kebijakan mengenai investigasi <i>fraud</i> , serta aturan perilaku atau etika profesi.
(Rustiarini & Sunarsih, 2015)	Bali	Mekanisme whistleblower system.
(Kristiyani & Hamidah, 2020)	Pemerintahan Indonesia	Taktik Teknis: Pengawas Privasi, Internet of Things, Akses Data, Akurasi Waktu Pelaporan, Manajemen Data secara Real-Time. Dua Pola Pendekatan: Perspektif budaya, Pengawasan internal (audit internal serta eksternal, investigasi fraud, serta akuntansi forensik). Taktik Preventif: Sistem Deteksi Kecurangan memakai Machine Learning Algorithm, Data Mining, serta Meta Learning.
(Kuntadi et al., 2022)		Kelayakan kompensasi berdampak pada prevensi manipulasi, sistem pengawasan internal berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan, dan kapabilitas SDM memengaruhi mitigasi korupsi.
(Kurniasari et al., 2019)	Salah satu Instansi Pemerintah di Indonesia	(1) Memperkuat sistem monitor dan kendali, (2) mengoptimalkan budaya kerja, (3) membangun fondasi anti-kriminalitas dalam instansi, (4) menjalankan sistem upah dan sanksi yang lugas, (5) mensosialisasi karyawan mengenai anti-kejahatan, dan (6) menyusun tim transformasi.
(Yuniarti, 2017)	Organisasi Antar-Pemerintah di Indonesia	Menciptakan kontrol internal yang mumpuni dan menumbuhkan kesadaran anti-fraud di seluruh jajaran Perusahaan.
(Rizvi, 2021)	Pakistan	Pengawasan internal, pemeriksaan internal dan

		eksternal, edukasi, whistle blowing, perputaran pegawai, aplikasi regulasi anti-kecurangan dan sanksi, kebijakan HRM yang tangguh, integritas pimpinan, serta e-governance.
(Kustiawan, 2017)		Mengakselerasi pengawasan intern.
(Ndege Joseph et al., 2015)	Kenya	Demi mencegah dan mengidentifikasi manipulasi pada kas wilayah serta badan lainnya, regulasi serta sistem kontrol internal yang efisien wajib diimplementasikan.
(Wardoyo et al., 2022)		Whistleblowing System serta Surprise Audit.
(Okoye et al., 2013)	Nigeria	Akuntan forensik wajib diberdayakan selaras dengan edukasi kemahiran forensic accounting.
Abdullahi & Mansor, 2018)	Nigeria	Untuk memajukan taraf hidup pegawai serta menaikkan pendapatan upah ASN, rezim Nigeria merilis Salary Scale Reform (SSR). Selain itu, otoritas Nigeria perlu menginisiasi agenda edukasi seperti loka karya, seminar, dan diskusi untuk memperbaiki tabiat pekerja serta memperdalam wawasan efek destruktif fraud.
(Omar & Bakar, 2012)	Malaysia	Audit mendadak, fraud hotline, agenda ataupun edukasi preventif kecurangan, regulasi anti-manipulasi, tinjauan kerentanan fraud, audit operasional, kebijakan pelaporan pelanggaran, audit internal atau unit pemeriksaan kecurangan, serta mengeksekusi sanksi dan langkah disipliner.
(Yulifah & Irianto, 2013)		Menerapkan sistem kendali internal bermutu tinggi meliputi kepemilikan unit

		audit internal guna monitoring rutin, menjalankan kontrol lewat sistem pembagian tugas, fungsi legalitas, fungsi pengarsipan dan desain, serta memantau sistem akuntansi pada kaidah konservatif dan unggul.
(Kassem & Higson, 2012)		Memberi tambahan instruksi untuk auditor eksternal terkait dengan: evaluasi dan reaksi risiko kecurangan.
(Eze & Okoye, E., 2019)	Nigeria	Forensic Accounting disubstitusi oleh auditor eksternal dari Wilayah Kogi yang memperoleh edukasi yang memadai serta pelatihan berulang

Hasil sintesis sistematis terhadap berbagai penelitian menunjukkan bahwa pencegahan fraud pada sektor pemerintah merupakan konstruksi tata kelola yang bersifat komprehensif dan integratif. Temuan empiris dari berbagai konteks pemerintahan, termasuk di Malaysia, Indonesia, Pakistan, Nigeria, dan Kenya, memperlihatkan pola konsisten bahwa efektivitas pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh kombinasi mekanisme pengendalian struktural, sistem pengawasan, kapasitas teknologi, serta faktor perilaku organisasi.

### 1. Penguatan Pengendalian Internal sebagai Pilar Utama Pencegahan

Literatur menunjukkan bahwa pengendalian internal merupakan instrumen fundamental dalam meminimalkan peluang terjadinya fraud di sektor publik. Sistem pengendalian yang efektif ditandai oleh pemisahan fungsi, mekanisme otorisasi yang jelas, dokumentasi prosedural yang memadai, serta pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas keuangan dan operasional. Keberadaan audit internal yang independen juga berfungsi sebagai sarana monitoring yang memastikan kepatuhan terhadap standar tata kelola.

Temuan lintas studi menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian internal berkorelasi dengan meningkatnya risiko penyimpangan, sedangkan penguatan sistem kontrol mampu menekan peluang kecurangan melalui pembatasan akses, peningkatan akuntabilitas, dan penguatan transparansi organisasi. Efektivitas pengendalian internal juga ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia serta komitmen pimpinan terhadap prinsip tata kelola yang baik.

### 2. Sistem Pelaporan Pelanggaran sebagai Mekanisme Deteksi Dini

Whistleblowing system diidentifikasi sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kapasitas deteksi fraud pada tahap awal. Sistem pelaporan yang menyediakan kanal anonim, perlindungan terhadap pelapor, serta prosedur tindak lanjut yang jelas terbukti meningkatkan probabilitas pengungkapan kecurangan. Selain fungsi deteksi, sistem pelaporan pelanggaran juga memiliki efek preventif karena meningkatkan persepsi risiko bagi pelaku potensial.

Dalam konteks organisasi sektor publik, keberadaan mekanisme pelaporan yang kredibel memperkuat transparansi dan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung akuntabilitas.

### **3. Peran Audit dan Akuntansi Forensik dalam Pengawasan**

Audit internal, audit eksternal, dan audit kejutan merupakan instrumen pengawasan yang berperan dalam memperkuat sistem pencegahan fraud. Audit yang dilakukan secara berkala dan tidak terjadwal meningkatkan efektivitas pengawasan karena mengurangi prediktabilitas kontrol organisasi. Selain itu, penerapan akuntansi forensik memberikan kontribusi signifikan dalam investigasi kecurangan kompleks melalui analisis transaksi keuangan dan rekonstruksi bukti.

Pelatihan auditor dalam teknik investigasi dan analisis forensik juga meningkatkan kapasitas institusional dalam mendeteksi indikasi fraud secara lebih akurat.

### **4. Pemanfaatan Teknologi dalam Pencegahan Fraud**

Perkembangan teknologi informasi mendorong transformasi pendekatan pencegahan fraud dari model reaktif menuju model proaktif berbasis analitik. Pemanfaatan data mining, machine learning, serta sistem pengendalian data real-time memungkinkan organisasi melakukan pemantauan berkelanjutan terhadap aktivitas keuangan. Pendekatan berbasis teknologi ini meningkatkan kemampuan organisasi dalam mendeteksi anomali transaksi serta mempersempit ruang terjadinya penyimpangan.

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan juga berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan efisiensi pengawasan.

### **5. Budaya Organisasi dan Nilai Integritas**

Selain mekanisme struktural, pembangunan budaya organisasi berbasis integritas merupakan faktor penting dalam pencegahan fraud. Implementasi kode etik, sosialisasi nilai anti-fraud, serta penerapan sistem penghargaan dan sanksi yang konsisten membentuk kontrol informal yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Budaya organisasi yang kuat berfungsi memperkuat efektivitas sistem pengendalian formal melalui internalisasi nilai kejujuran dan tanggung jawab.

### **6. Faktor Sumber Daya Manusia dalam Pencegahan Fraud**

Literatur juga menegaskan bahwa kebijakan manajemen sumber daya manusia berperan dalam mengurangi motivasi dan rasionalisasi fraud. Program pelatihan anti-fraud, rotasi jabatan, peningkatan kompetensi profesional, serta kebijakan kesejahteraan pegawai terbukti berkontribusi dalam menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas. Dengan demikian, pencegahan fraud tidak hanya bersifat sistemik, tetapi juga bergantung pada kualitas individu dalam organisasi.

### **Sintesis Temuan**

Secara keseluruhan, hasil systematic literature review menunjukkan bahwa pencegahan fraud sektor pemerintah memerlukan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pengendalian internal, mekanisme pelaporan pelanggaran, pengawasan audit, pemanfaatan teknologi, penguatan budaya organisasi, serta kebijakan pengelolaan sumber daya manusia. Integrasi berbagai mekanisme tersebut mampu menekan peluang, tekanan, dan rasionalisasi yang menjadi determinan utama terjadinya fraud dalam organisasi sektor publik.

Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pencegahan fraud yang efektif tidak bersifat parsial, melainkan membutuhkan sistem tata kelola yang komprehensif dan berkelanjutan.

## SIMPULAN

Pengawasan Intern yang Andal dan Efisien, Optimalisasi Budaya Institusi, Penyusunan Aturan serta Tata Cara guna Menangkal Kecurangan (*anti-fraud policy*), *Whistle Blowing*, serta Implementasi Akuntansi Forensik merupakan beberapa taktik yang ampuh untuk meredam penipuan di sektor publik, merujuk pada hasil sintesis enam belas makalah. Berdasarkan temuan riset di atas mampu dipaparkan implikasi secara teoretis yaitu selaku bahan pertimbangan bagi lembaga pemerintahan pusat ataupun wilayah yang sedang menyusun strategi untuk mitigasi kecurangan laporan keuangan, kelima unsur preventif *fraud* di atas akan dijadikan acuan. Sementara itu, untuk kajian berikutnya, dapat dilaksanakan studi lanjutan yang memvalidasi efikasi kelima elemen pencegahan *fraud* tersebut.

## REFERENCES

- Abdullahi, R., & Mansor, N. (2018). Fraud prevention initiatives in the Nigerian public sector: Understanding the relationship of fraud incidences and the elements of fraud triangle theory. *Journal of Financial Crime*, 25(2), 527–544. <https://doi.org/10.1108/JFC-02-2015-0008>
- ACFE. (2020). *Fraud Examiners Manual 2020 International Edition*. In Association of Certified Fraud Examiners, Inc.
- ACFE Indonesia. (2020). *Survei Fraud Indonesia 2019*. Indonesia Chapter #111, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Albrecht, W., Howe, K. & Romney, M. (1984). *Deterring fraud: The internal auditor's perspective*. Altamonte Springs, FL: The Institute of Internal Auditors Research Foundation.
- Albrecht, W.S. (2005). *Identifying Fraudulent Financial Transactions: A Framework for Detecting Financial Statement Fraud*. Brigham Young University.
- Albrecht, W., Albrecht, C., & Albrecht, C. (2004). *Fraud And Corporate Executives: gency, Stewardship & Broken Trust*. *Journal of Forensic Accounting*, (5), 109-130
- Arief, A., & Yunus Abbas, M. (2021). *Kajian Literatur (Systematic Literature Review): Kendala Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. *PROtek : Jurnal Ilmiah Teknik Elektro*, 8(1), 1–6. <https://doi.org/10.33387/protk.v8i1.1978>
- Arifin, Z., & Utami, W. (2020). *Pengendalian internal dan pencegahan kecurangan di sektor publik*. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 17(1), 45–58.
- Eze, E., & Okoye, E., I. (2019). *Forensic Accounting and Fraud Detection and Prevention in Imo State Public Sector*. *Accounting and Taxation Review*, 3(1), 12–26.
- Ghazali, M. Z., Rahim, M. S., Ali, A., & Abidin, S. (2014). *A Preliminary Study on Fraud Prevention and Detection at the State and Local Government Entities in Malaysia*. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 164(August), 437–444. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2014.11.100>
- Gunadi, E. M. (2001). *Prevention and Detection of Fraud a Challenge to the Internal Auditors*. *Kriminologi Indonesia*, 1(III), 43–49.
- International Standards on Auditing (ISA) 240. (2009). *International Standard on Auditing 240 the Auditor ' S Responsibilities Relating To Fraud in an Audit of Financial Statements*. 155–197.
- Hopwood, W. L. (2008). *Forensic Accounting*. New York: NY: The McGraw-Hill Companies, Inc

- Kassem, R., & Higson, D. A. (2012). Financial Reporting Fraud: Are Standards' Setters and External Auditors doing enough? *International Journal of Business and Social Science*, 3(19).
- Kitchenham, B. A., & Charters, S. (2007). Guidelines for performing Systematic Literature Reviews in Software Engineering. EBSE Technical Report EBSE-2007-01, January, 1–57.
- Kristiyani, D., & Hamidah. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 289–304. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732>
- Kuntadi, C., Puspita, B. A., & Taufik, A. (2022). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pencegahan Sumber Daya Manusia, Kesesuaian. *Jurnal Ekonomi Manajemn Sistem Informasi*, 3(5), 530–539.
- Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2). [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v9i2.27633](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633)
- Kustiawan, M. (2017). Pengaruh Pengendalian Intern Dan Tindak Lanjut Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Yang Berimplikasi Terhadap Pencegahan Fraud. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 345–362. <https://doi.org/10.24912/ja.v20i3.2>
- Kitchenham, B. (2004). *Procedures for performing systematic reviews*. Keele University Technical Report TR/SE-0401.
- Kranacher, M.-J. (2010). Chapter 3: Who Commits Fraud and Why: Criminology and Ethics. In M.-J. Kranacher, R. Riley, & J. T. Wells, *Forensic Accounting and Fraud Examination* (pp. 58-85). Hoboken: John Wiley & Sons, Inc.
- Ndege Joseph, O., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention*, 4(1), 47–57. [www.ijbmi.org](http://www.ijbmi.org)
- Okoye, E. I., Fiia, & Fsm, F. (2013). Forensic Accounting: A Tool for Fraud Detection and Prevention in the Public Sector. (A Study of Selected Ministries in Kogi State). *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 3(3), 2222– 6990.
- Okoye, E. I. & Akamobi, N. L. (2009). The Role of Forensic Accounting in Fraud Investigation and Litigation Support. *The Nigerian Academic Forum Vol. 17 No1 In Business And Social Science*, 3(3).
- Omar, N., & Bakar, K. M. A. (2012). Fraud Prevention Mechanisms of Malaysian Government linked Companies: An assessment of existence and effectiveness. *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 8(1), 15–31.
- Rezaee, Z. R. (2010). *Financial Statement Fraud- Prevention and Detection*. 2nd Edition. Hoboken: NJ: John Wiley & Sons.
- Rizvi, A. (2021). Prevention of Frauds in Public Sector Organizations: A Case of Pakistan. *Journal of Development and Social Sciences*, 2(III), 225–244. [https://doi.org/10.47205/jdss.2021\(2-iii\)21](https://doi.org/10.47205/jdss.2021(2-iii)21)
- Rustiarini, N. W., & Sunarsih, N. M. (2015). Fraud dan Whistleblowing: Pengungkapan Kecurangan Akuntansi oleh Auditor Pemerintah. *Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XVIII*, 2, 1–19.
- Sholihah, S., & Prasetyono, -. (2016). Fraud Pelaporan Keuangan Sektor Publik. *Journal of Auditing, Finance, and Forensic Accounting*, 4(1), 53. <https://doi.org/10.21107/jaffa.v4i1.1882>
- The Institute of Internal Auditors. (2009). *Internal Auditing and fraud*. In IIPF Practice Guide. <https://doi.org/10.1201/9781315267555-9>

- The Institute of Internal Auditors. (2019). IIA position paper. Fraud and Internal Audit, 1–4. <https://na.theiia.org/about-ia/PublicDocuments/Fraud-and-Internal-Audit.pdf>
- Tim Penyusun Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). (2017). State Financial Audit Standards (SPKN), 2017. In BPK Regulation No.1 2017.
- Wahono, R. S. (2015). A Systematic Literature Review of Software Defect Prediction: Research Trends, Datasets, Methods and Frameworks. *Journal of Software Engineering*, 1(1), 1–16.
- Wardoyo, D. U., Arya, M., Pawestri, D. W., & Shakuntala, B. (2022). Whistleblowing System Dan Surprise Audit : Strategi Pencegahan Fraud. 1(2), 157–168.
- Transparency International. (2022). *Corruption perceptions index 2022*. <https://www.transparency.org/en/cpi/2022>
- Yulifah, A., & Irianto, G. (2013). Persepsi auditor eksternal tentang determinan pencegahan kecurangan laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya*, 2(2), 1–27.
- Yuniarti, R. D. (2017). The effect of internal control and anti-fraud awareness on fraud prevention (A survey on inter-governmental organizations). *Journal of Economics, Business & Accountancy Ventura*, 20(1), 113–124. <https://doi.org/10.14414/jebav.v20i1.626> <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-4524789/garuda-diduga-manipulasi-laporan-keuangan-bagaimana-pengawasan-rini>